

Refleksi Historis Seabad Sleman

Oleh: Hendra Kurniawan

TEPAT pada 15 Mei 2016, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berusia seabad. Keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilacak dalam dokumen dan arsip sejarah pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya dalam *Rijksblad* Nomor 11 Tahun 1916 tertanggal 15 Mei 1916. Isinya keputusan membagi wilayah Kasultanan Yogyakarta yang merupakan daerah otonom atau swapraja (*vorstenlanden*) menjadi tiga kabupaten yakni Kalasan, Bantul, dan Sleman. Untuk itu diangkatlah bupati untuk masing-masing daerah tersebut.

Ada dua versi mengenai asal nama Sleman. *Pertama*, berasal dari kata saliman; liman artinya gajah. Konon daerah Sleman dahulu memiliki hutan yang sangat luas. Hutan tersebut dihuni oleh gajah beserta keturunannya. Gajah tersebut merupakan tunggangan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Hal ini kemudian ditandai dengan keberadaan patung gajah beserta dua anaknya di Lapangan Denggung, Jalan Magelang, sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman.

Kedua, versi berikutnya diambil dari nama Mbah Sulaiman, seorang pendakwah pertama di Keraton Mataram Islam. Nama aslinya Sayyid Sulaiman Mojo Agung bin Abdul Wahab Basyaiban. Makam Mbah Sulaiman terletak di sebelah barat Masjid Agung Sleman. Mbah Sulaiman menjadi ulama keraton yang disegani sehingga pengaruhnya besar bagi masyarakat Sleman. Bahkan keturunan Mbah Sulaiman, Abdullah bin Ahmad Basyaiban, menjadi menantu dari Sri Sultan Hamengku Buwono II.

Masih dalam *Rijksblad* Nomor 11 Tahun 1916 disebutkan pula bahwa Kabupaten Sleman membawahi empat distrik yakni

Distrik Mlati dengan lima onderdistrik dan 46 kalurahan, Distrik Klegoeng dengan enam onderdistrik dan 52 kalurahan, Distrik Joemeneng dengan enam onderdistrik dan 58 kalurahan, dan Distrik Godean dengan delapan onderdistrik dan 55 kalurahan. Setiap distrik dipimpin oleh seorang Panji yang bertanggung jawab pada Bupati. Sleman yang wilayahnya luas ini sempat diturunkan statusnya dari kabupaten menjadi distrik di bawah wilayah Kabupaten Yogyakarta. Tanggal 8 April 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX melakukan penataan ulang dan menempatkan Sleman pada status semula sebagai kabupaten dengan KRT Pringgodiningrat sebagai bupati.

Nilai persatuan

Hari jadi Kabupaten Sleman ditandai dengan surya sengkala berbunyi *Rasa Manunggal Hanggatra Negara*. Sengkalan ini dapat dijelaskan dengan bilangan 6 (*rasa*), 1 (*manunggal*), 9 (*hanggatra*), dan 1 (*negara*), sehingga terbaca angka tahun 1916. Surya sen-

gkala ini mengandung makna filosofi bagi masyarakat Jawa yakni rasa persatuan membentuk negara. Dari makna tersebut dapat ditarik nilai dasar yang penting untuk dihidupi bersama oleh masyarakat Sleman yakni semangat persatuan untuk turut membangun negara.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII menyatakan keraton sepenuhnya bergabung dan mendukung pemerintahan RI, maka Sleman pun berada di bawah NKRI. Pada masa revolusi fisik, tatkala Yogyakarta menjadi ibukota RI, Sleman turut berkontribusi dalam perjuangan. Dengan semangat persatuan, *manunggaling kawula gusti*, Bupati Sleman saat itu, KRT Projodiningrat, turut bergerilya bersama tentara dan rakyat (PJ Suwarno, 1994).

Tak hanya itu, Sleman juga andil dalam dinamika pemerintahan di Yogyakarta. Pada masa awal kemerdekaan, di setiap kabupaten terdapat *kapane-*

won (sepadan kecamatan). Sebuah *kapanewon* terdiri dari sejumlah desa (kalurahan) yang masing-masing terdiri dari beberapa dukuh. Sleman menjadi pionir semangat demokrasi dengan mengedepankan persatuan saat terjadi gesekan dalam pemerintahan. Melalui rapat tanggal 4 Januari 1947 di pendapa *Kapanewon* Sleman, keluarlah mosi yang isinya agar wakil rakyat di kabupaten dan DIY dipilih oleh kepala somah seperti halnya Dewan Kalurahan. Cara ini dianggap lebih demokratis sebab partai politik saat itu baru mulai tumbuh sehingga calon dari partai politik dianggap belum mampu mewakili aspirasi rakyat secara utuh.

Refleksi bersama

Merunut perjalanan sejarah masa awal kemerdekaan ini tampak bahwa semangat persatuan sungguh menjadi sendi utama dalam kehidupan bersama masyarakat Sleman. Dalam masa-masa selanjutnya semangat ini tentu diupayakan untuk selalu dibina. Beberapa kasus yang sempat mencuat di wilayah Sleman terutama terkait dengan dinamika sosial dan politik akhir-akhir ini, menyadarkan kita akan pentingnya rasa persatuan. Isu-isu bermuatan SARA maupun adu domba lainnya perlu disikapi secara bijak dan dengan kepala dingin.

Para pendahulu dan tokoh masyarakat Sleman pada masa perjuangan terbukti berhasil membina persatuan dalam gelora demokrasi dan konflik. Fakta mental (*mentifact*) yang mereka cerminkan ini hendaknya dapat diteladani oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat Sleman pada masa sekarang. Maka dengan merefleksikan jejak sejarah seabad Sleman mengajak semua elemen masyarakat kembali memaknai cita-cita *Rasa Manunggal Hanggatra Negara* untuk Sleman yang semakin baik. Dirgahayu Sleman! ***

Hendra Kurniawan, M.Pd.,

Dosen Pendidikan Sejarah
FKIP Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, tinggal di Sleman.

